Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 663 – 668

RESEARCH ARTICLE

Kebijakan Pendidikan Islam dalam (Radikalisme, Gender, Narkoba, Inklusi, dan Inovasi)

Faruq Abdur Rouf
Manajemen Pendidikan Islam, Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

faruqarrouf@gmail.com

Kata Kunci:
Kebijakan Pendidikan Islam, Radikalisme, Gender, Narkoba, Inklusi, Inovasi Pendidikan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, yaitu radikalisme, kesetaraan gender, penyalahgunaan narkoba, pendidikan inklusi, dan inovasi pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terindeks Google Scholar serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi arah kebijakan pendidikan Islam dalam merespons isu-isu tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam telah diarahkan pada penguatan nilai moderasi beragama untuk mencegah radikalisme, pemberian kesempatan yang setara dalam pendidikan untuk mendukung kesetaraan gender, penguatan pendidikan karakter dalam pencegahan narkoba, penyediaan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui kebijakan inklusi, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam proses pembelajaran dan tata kelola lembaga. Kebijakan pendidikan Islam diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menjaga relevansi lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan sosial dan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Key Word:
Islamic Education Policy, Radicalism, Gender Equality, Drug Prevention, Inclusive Education, Educational Innovation

Abstract

This study aims to analyze Islamic education policy in addressing contemporary challenges, including radicalism, gender equality, drug abuse prevention, inclusive education, and educational innovation. A qualitative approach was employed using a library research method. Data were collected from Indonesian scientific journal articles indexed in Google Scholar as well as relevant policy documents. The data were analyzed through content analysis to identify the direction of Islamic education policies in responding to these issues. The findings indicate that Islamic education policies have been directed toward strengthening religious moderation to prevent radicalism, providing equal educational opportunities to promote gender equality, reinforcing character education to prevent drug abuse, ensuring access for students with special needs through inclusive education policies, and developing technology-based innovations in learning processes and institutional management. Islamic education policy is positioned as a strategic instrument in maintaining the relevance of Islamic educational institutions in the face of social change and technological advancement while preserving Islamic values.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam dipahami sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan sikap keberagamaan peserta didik. Dalam konteks kelembagaan, pendidikan Islam tidak hanya diposisikan sebagai proses transmisi ilmu, tetapi juga sebagai sistem yang dikelola melalui fungsi manajerial yang terstruktur agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan (Sholeh & Muzakki, 2023).

Manajemen pendidikan Islam dipandang sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam dan prinsip profesionalitas modern. Penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika sosial dan ideologis yang berkembang di masyarakat (Salim et al., 2023). Salah satu tantangan serius yang dihadapi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

lembaga pendidikan Islam adalah munculnya paham radikalisme yang berpotensi memengaruhi pola pikir peserta didik. Dalam beberapa penelitian, radikalisme dipahami sebagai fenomena yang dapat berkembang melalui pemahaman keagamaan yang sempit serta lemahnya sistem pengawasan kelembagaan (Sholeh & Muzakki, 2023).

Upaya pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan Islam dinilai perlu dilakukan melalui penguatan kurikulum, pembinaan budaya organisasi, serta pengembangan kompetensi pendidik yang berorientasi pada moderasi beragama. Model implementasi pendidikan Islam berbasis toleransi dinilai efektif dalam membangun daya tangkal terhadap ideologi ekstrem (Fauziah et al., 2025). Dalam konteks perguruan tinggi Islam, organisasi kurikulum yang dirancang untuk mencegah radikalisme telah diposisikan sebagai strategi manajerial yang penting. Kurikulum yang terstruktur dan berbasis moderasi dinilai mampu memperkuat internalisasi nilai kebangsaan dan toleransi di kalangan mahasiswa (Arifin et al., 2025). Selain isu radikalisme, persoalan gender juga menjadi perhatian dalam manajemen pendidikan Islam. Ketimpangan akses dan partisipasi gender dalam lembaga pendidikan Islam dinilai perlu ditangani melalui kebijakan kelembagaan yang adil dan proporsional (Alfarizi & Faizah, 2024).

Kontroversi gender dalam manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa kebijakan organisasi sering kali dipengaruhi oleh interpretasi sosial dan budaya yang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan manajerial yang berbasis keadilan dan kesetaraan dinilai perlu dikembangkan agar tidak terjadi diskriminasi struktural(Alfarizi & Faizah, 2024). Di sisi lain, prinsip inklusivitas dalam pendidikan Islam dipahami sebagai wujud implementasi nilai rahmatan lil ‘alamin dalam tata kelola lembaga pendidikan. Pendidikan inklusif dinilai harus dirancang melalui kebijakan manajemen yang mendukung keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi (Apriyadi et al., 2024).

Manajemen pendidikan inklusi dalam perspektif Islam menekankan pentingnya penyediaan fasilitas, adaptasi kurikulum, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara (Lutfidha & Fauji, 2024). Permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai tantangan yang memerlukan respons manajerial dalam pendidikan Islam. Meskipun kajian spesifik mengenai manajemen pendidikan Islam dan narkoba masih terbatas, pendekatan pendidikan berbasis nilai moral dan penguatan karakter dinilai sebagai strategi preventif yang relevan dalam sistem pendidikan Islam (Salim et al., 2023).

Inovasi dalam manajemen pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembaruan sistem yang mencakup integrasi teknologi, reformulasi kurikulum, dan pengembangan kepemimpinan transformasional. Kerangka pengelolaan pendidikan Islam berbasis multikultural dinilai mampu memperkuat daya adaptif lembaga dalam menghadapi perubahan global (Salim et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam dalam konteks manajemen pendidikan Islam dipahami sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan radikalisme, gender, narkoba, inklusi, dan inovasi secara terpadu. Penguatan sistem manajemen yang profesional dan berbasis nilai Islam dinilai menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berdaya saing (Sholeh & Muzakki, 2023; Salim et al., 2023).

Konsep Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam dipahami sebagai seperangkat keputusan strategis yang dirumuskan untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Islam agar selaras dengan nilai-nilai keislaman dan sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif akademik, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan prinsip syariah, tujuan pendidikan Islam, serta tuntutan perkembangan sosial modern (Syakdiah, 2023). Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, kebijakan pendidikan Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan globalisasi. Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan identitas keislamannya (Syakdiah, 2023).

Secara konseptual, kebijakan pendidikan Islam dirumuskan melalui proses perencanaan strategis yang melibatkan analisis kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan program, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga pendidikan Islam dalam menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan, dan pengembangan karakter peserta didik (Syakdiah, 2023) Dalam kajian teoritis, ditegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lembaga, tata kelola kelembagaan, serta konsistensi implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi manajerial yang menuntut profesionalisme, akuntabilitas, serta integritas nilai (Syakdiah, 2023). Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam dapat diposisikan sebagai kerangka normatif dan strategis yang mengatur arah pengembangan lembaga

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pendidikan Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti radikalisme, kesetaraan gender, penyalahgunaan narkoba, pendidikan inklusi, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Manajemen Pendidikan Islam dan Tantangan Radikalisme

Radikalisme dipandang sebagai fenomena yang dapat muncul akibat kurangnya moderasi dan toleransi dalam lembaga pendidikan apabila tidak dikelola secara efektif (Sholeh & Muzakki, 2023). Studi menegaskan bahwa manajemen pendidikan Islam perlu menggunakan pendekatan strategis untuk membangun sistem pendidikan yang moderat melalui perencanaan kurikulum yang mengintegrasikan nilai pluralisme serta pembinaan budaya organisasi yang toleran (Sholeh & Muzakki, 2023). Peran lembaga pendidikan Islam dalam menanggulangi radikalisme mencakup penguatan pemahaman agama moderat, pelibatan orang tua serta komunitas, serta pengembangan program pembelajaran yang berorientasi pada nilai toleransi dan dialog antar-umat beragama (Sholeh & Muzakki, 2023).

Kebijakan Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dipahami sebagai pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan menduduki posisi kepemimpinan. Prinsip ini dipandang sebagai bagian dari nilai keadilan dalam Islam (Kasman et al., 2024). Kebijakan pendidikan Islam telah diarahkan untuk menghilangkan perlakuan yang membedakan berdasarkan jenis kelamin. Kesempatan belajar, berprestasi, dan memimpin diberikan secara adil kepada semua pihak. Peran perempuan dalam kepemimpinan lembaga pendidikan Islam telah dikaji sebagai faktor penting dalam menciptakan organisasi pendidikan yang inklusif dan kompetitif. Dalam perspektif kebijakan, kesetaraan gender telah dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak membedakan jenis kelamin dalam akses pendidikan maupun kesempatan pengembangan profesional. Perempuan dalam lembaga pendidikan Islam juga telah diberi ruang untuk berperan dalam manajemen dan kepemimpinan sehingga kualitas lembaga pendidikan dapat meningkat (Kasman et al., 2024)

Kebijakan Pendidikan Islam dalam Pencegahan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan pendidikan telah dipandang sebagai ancaman serius terhadap pembentukan karakter generasi muda. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan preventif telah diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan internalisasi nilai moral berbasis ajaran Islam (Apriyadi et al., 2024). Strategi kebijakan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan Islam telah mencakup pembinaan spiritual, pengawasan lingkungan sekolah, serta kerja sama dengan orang tua dan masyarakat sebagai bentuk pendekatan komprehensif. Dalam literatur kebijakan pendidikan, pencegahan narkoba telah dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko lembaga pendidikan yang bertujuan menjaga lingkungan belajar tetap kondusif dan aman

Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusi

Konsep pendidikan inklusi dalam perspektif Islam telah didasarkan pada prinsip keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman manusia. Kebijakan pendidikan Islam telah diarahkan untuk menjamin akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi (Isroani, 2021). Implementasi kebijakan inklusi dalam lembaga pendidikan Islam telah menuntut penyesuaian kurikulum, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi secara.Dalam kajian manajemen pendidikan, keberhasilan kebijakan inklusi telah dikaitkan dengan komitmen pimpinan lembaga serta dukungan regulasi yang jelas dan berkelanjutan.

Inovasi dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Inovasi dalam pendidikan Islam merupakan respons terhadap tuntutan perubahan zaman termasuk perkembangan teknologi, digitalisasi pendidikan, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten. Transformasi kebijakan telah diarahkan pada integrasi teknologi pembelajaran dan penguatan literasi digital dalam lembaga pendidikan Islam, Penelitian empiris menunjukkan bahwa integrasi teknologi pembelajaran digital dalam kurikulum pendidikan Islam mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik (Sari et al., 2025).

Strategi inovasi lainnya mencakup peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan literasi digital, penggunaan platform pembelajaran berbasis e-learning, serta pengembangan kurikulum yang sinergis antara teknologi dan nilai-nilai Islam (Sari et al., 2025). Inovasi tersebut semakin relevan dengan apresiasi konsep manajemen yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan global tanpa mengabaikan nilai keagamaan (Rahman et al., 2024). Dalam perspektif kebijakan publik pendidikan, inovasi telah dipahami sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi yang mengharuskan lembaga pendidikan Islam untuk adaptif

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

tanpa meninggalkan nilai-nilai normatif keislaman. Kebijakan inovatif tersebut telah dikembangkan melalui digitalisasi sistem administrasi, penggunaan platform pembelajaran daring, serta peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam melahirkan suatu kebijakan secara multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada respon terhadap isu sosial kontemporer seperti radikalisme, gender, narkoba, inklusi, dan inovasi. Pendekatan teoretis tersebut memperkuat dasar untuk memahami kebijakan pendidikan Islam secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan analisis konseptual dan kebijakan dalam manajemen pendidikan Islam yang bersumber dari literatur ilmiah dan dokumen akademik yang relevan.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terindeks dan dapat diakses melalui Google Scholar, khususnya yang membahas manajemen pendidikan Islam, radikalisme, gender, narkoba, pendidikan inklusif, dan inovasi pendidikan. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas kajian.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis), di mana data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu radikalisme, gender, narkoba, inklusi, dan inovasi dalam perspektif manajemen pendidikan Islam (Krippendorff, 2018). Setiap temuan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam dalam Pencegahan Radikalisme

Radikalisme dalam konteks pendidikan telah dipahami sebagai ancaman ideologis yang dapat berkembang melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial di lingkungan lembaga pendidikan apabila tidak dikelola secara sistematis. Oleh karena itu, pencegahan radikalisme dalam pendidikan Islam perlu ditempatkan dalam kerangka manajemen kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen strategis, pencegahan radikalisme perlu dimulai dari perumusan visi dan misi lembaga pendidikan Islam yang secara eksplisit menegaskan komitmen terhadap moderasi beragama dan nilai kebangsaan. Visi kelembagaan yang inklusif akan memengaruhi arah kebijakan, perencanaan program, serta budaya organisasi.

Perencanaan kurikulum perlu dirancang secara integratif dengan memasukkan nilai-nilai toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap keberagaman. Integrasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam mata pelajaran tertentu, tetapi juga dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter moderat. Dalam tahap pengorganisasian, mekanisme rekrutmen tenaga pendidik perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan komitmen ideologis dan profesionalisme. Tenaga pendidik yang memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif akan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dari infiltrasi paham radikal.

Pengawasan internal lembaga pendidikan juga perlu diperkuat melalui sistem monitoring kegiatan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Sistem tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpikir, melainkan untuk memastikan bahwa aktivitas kelembagaan tetap berada dalam koridor nilai-nilai moderasi dan konstitusi negara. Budaya organisasi yang dialogis dan partisipatif perlu dikembangkan agar peserta didik terbiasa menyampaikan pendapat secara terbuka dan kritis tanpa terjebak pada pola pikir eksklusif. Budaya ini hanya dapat terwujud apabila kepemimpinan lembaga bersifat transformasional dan mendorong komunikasi dua arah. Dengan demikian, pencegahan radikalisme dalam pendidikan Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kurikulum semata, tetapi harus diintegrasikan dalam keseluruhan fungsi manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kelembagaan.

Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam yang Responsif Gender

Isu gender dalam pendidikan Islam telah ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi manajemen kelembagaan. Ketimpangan akses dan partisipasi pendidikan berbasis gender perlu diidentifikasi melalui analisis kebijakan yang objektif dan berbasis data. Dalam fungsi perencanaan, kebijakan yang responsif gender perlu dirumuskan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan belajar yang setara. Perencanaan tersebut mencakup distribusi fasilitas, akses terhadap program unggulan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan kepemimpinan siswa.

Pengorganisasian struktur kelembagaan juga perlu memperhatikan representasi gender dalam posisi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

manajerial. Kepemimpinan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam perlu didukung sebagai bagian dari prinsip keadilan dan profesionalisme. Dalam aspek pelaksanaan, proses pembelajaran perlu dirancang tanpa bias stereotip gender. Materi ajar dan metode pembelajaran perlu dikembangkan agar tidak mereproduksi pandangan diskriminatif yang dapat menghambat partisipasi peserta didik perempuan. Sistem evaluasi kelembagaan perlu dilengkapi dengan indikator kesetaraan gender, seperti angka partisipasi, tingkat kelulusan, serta keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Evaluasi tersebut akan membantu lembaga mengidentifikasi potensi ketimpangan dan merumuskan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam yang responsif gender tidak hanya menegaskan kesetaraan normatif, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan yang konkret dalam tata kelola kelembagaan.

Manajemen Pendidikan Islam dalam Pencegahan dan Penanganan Narkoba

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah dipandang sebagai tantangan sosial yang memerlukan pendekatan kelembagaan komprehensif. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, strategi pencegahan perlu dirancang melalui kebijakan internal yang sistematis. Pada tahap perencanaan, program pencegahan narkoba perlu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan lembaga. Program tersebut dapat berupa penyuluhan, pelatihan ketahanan diri, serta integrasi nilai moral dan spiritual dalam pembinaan karakter.

Pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling perlu diperkuat agar peserta didik yang terindikasi memiliki risiko dapat ditangani secara dini. Unit konseling perlu dilengkapi dengan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam pendekatan psikologis dan spiritual. Pelaksanaan program pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Sinergi tersebut akan memperkuat sistem kontrol sosial yang berkelanjutan di luar lingkungan sekolah.

Pengawasan terhadap tata tertib dan lingkungan sekolah juga perlu dilakukan secara konsisten. Kebijakan disiplin yang tegas namun edukatif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dari pengaruh negatif. Evaluasi program pencegahan narkoba perlu dilakukan secara periodik untuk mengukur efektivitas kebijakan. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan kasus, tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan ketahanan moral peserta didik. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam dalam konteks narkoba perlu mengintegrasikan pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam sistem tata kelola kelembagaan.

Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Inklusi

Pendidikan inklusif dalam perspektif Islam telah didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks manajemen, prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan kelembagaan yang operasional. Perencanaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan agar ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Aksesibilitas fisik dan fasilitas pendukung menjadi indikator kesiapan lembaga dalam mengimplementasikan inklusi. Kurikulum perlu dirancang secara adaptif agar dapat mengakomodasi keragaman kemampuan peserta didik. Penyesuaian metode pembelajaran dan sistem evaluasi perlu dilakukan tanpa mengurangi standar mutu pendidikan. Pengembangan kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam pendidikan inklusif. Pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran diferensiatif perlu diberikan secara berkala.

Budaya organisasi yang menghargai keberagaman perlu dikembangkan melalui kegiatan yang mendorong empati dan solidaritas sosial. Lingkungan yang suportif akan membantu peserta didik berkebutuhan khusus merasa diterima. Evaluasi kebijakan inklusi perlu dilakukan melalui pemantauan partisipasi dan capaian belajar peserta didik. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan kelembagaan. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam berbasis inklusi menuntut komitmen struktural dan kultural yang berkelanjutan.

Inovasi dalam Manajemen Pendidikan Islam

Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah mendorong lembaga pendidikan Islam untuk melakukan inovasi manajerial. Inovasi tersebut dipandang sebagai strategi untuk mempertahankan relevansi dan daya saing lembaga. Digitalisasi administrasi dan sistem informasi manajemen telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan lembaga. Sistem tersebut memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Inovasi kurikulum telah diarahkan pada integrasi nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21, seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi. Pembaruan tersebut dirancang agar lulusan memiliki kesiapan menghadapi tantangan global. Model kepemimpinan transformasional telah diterapkan untuk mendorong budaya inovasi dalam organisasi. Kepemimpinan yang visioner akan memotivasi tenaga pendidik untuk beradaptasi terhadap perubahan.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Manajemen mutu berbasis evaluasi berkelanjutan telah dikembangkan melalui penerapan standar nasional dan internasional. Sistem penjaminan mutu internal menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia industri dan lembaga riset, telah dilakukan untuk memperluas jejaring kelembagaan. Kerja sama tersebut memperkuat posisi pendidikan Islam dalam ekosistem pendidikan nasional. Dengan demikian, inovasi dalam manajemen pendidikan Islam tidak hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga mencakup transformasi budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem penjaminan mutu yang berorientasi masa depan.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam telah diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi lembaga pendidikan Islam. Melalui kebijakan yang terarah dan terencana, upaya pencegahan radikalisme telah dilakukan dengan penguatan nilai moderasi dan toleransi. Kesetaraan gender telah diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama dalam akses dan kepemimpinan pendidikan. Pencegahan narkoba telah diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan pembinaan moral. Pendidikan inklusi telah dikembangkan untuk menjamin hak belajar bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Selain itu, inovasi berbasis teknologi telah diterapkan guna menjaga relevansi dan mutu pendidikan Islam di era modern. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

Alfarizi, S., & Faizah, N. (2024). *Gender Controversy in Islamic Education Management (Policy Trends and Inclusion Solutions)*. *05*(01), 27–41.

Apriyadi, R., Septia, R., Hidayat, T., Elistatia, U., Junaidah, & Abdurahman. (2024). Manajemen Pendidikan Inklusif Berbasis Nilai-Nilai Islam: Strategi Pengembangan Kurikulum dan Fasilitas Untuk Mendukung Keberagaman Peserta Didik. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, *7*(2). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/download/17243/7250

Arifin, Z., Nabila, T. K., & Rahmi, S. (2025). *Organization of Islamic Education Curriculum to Prevent Radicalism Among Students in Indonesian Universities*. *22*(1).

Fauziah, D. N., Ramdhani, K., Muzaki, I. A., Permana, I., Karawang, U. S., Sains, U., & Email, C. (2025). *AN Implementation Islamic Education Model To Build Tolerance*. *7*(3), 602–621. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i3.8015

Isroani, F. (2021). *Manajemen Pembelajaran Agama Islam*. *6*, 190–200.

Kasman, Setiadi, F. M., & Zulfikar. (2024). *Transformational Leadership : Women ' s Role in Building Competitive Integrated Islamic School*. *08*(03), 942–956.

Lutfidha, B. P., & Fauji, I. (2024). *Manajemen Pendidikan Inklusi Menurut Perspektif Islam*. *01*(02), 138–150.

Salim, N. A., Cakranegara, P. A., & Susanto, M. R. (2023). *Framework for Managing Multicultural Based Islamic Education in Schools*. *07*(01), 191–202.

Sari, I. R., Rahman, H. T. F., Weni, B. A., Ammirudin, & Fitri, T. A. (2025). Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Manajemen Inovasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*, 417–428.

Sholeh, M. I., & Muzakki, H. (2023). *EDUSIANA : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam Manajemen Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam*. 1–20.

Syakdiah, H. (2023). *At Turots : Jurnal Pendidikan Islam Eksistensi Manajemen Pendidikan Islam dalam Tatanan Pendidikan Indonesia di Masa Depan*. *5*(1), 737–745.